

STUDI EFISIENSI PERBANKAN SYARIAH DI KOTA LHKSEUMAWE DAN ACEH UTARA

Iskandar

Program Studi Ekonomi Islam STAIN Malikussaleh Lhokseumawe
Jln. Cempaka No. 1 Lancang Garam Lhokseumawe
email: iskandar_is52yahoo.com

Abstracts: *The development of Islamic banking in Aceh should have get more attention because its existence is not only as complement of the national banking system, but also as an attempt to fill the Islamic Shari'a with the Islamic financial institutions. The issue becomes important to investigate since the efficiency of banking institutions urgently need to this performance. Thus, in this study, the efficiency of Islamic banking will be viewed from two aspects: Firstly, the ability of the bank in generating output, in this case the low cost of financing. Secondly, efficiency can also be observed by looking at the bank's performance in minimizing the risk of financing. This study concluded that the main difficulty of Aceh Islamic banks is not the lack of cheap enough money so that the efficiency becomes less when it is compared with the required cost. However, the annual report shows that the assets of Islamic banks have developed positively and good. Likewise, the ratio of Non Performing Ratio (NPF) of Islamic banks is efficient. The study recommends enhancing the cheap fundraising (al-wadi'ah) to increase the pace of economic growth in the northern coastal area of Aceh.*

الملخص: كان ينبغي الحصول على المزيد من الاهتمام الى تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية في آتشيه لأن وجودها ليس فقط تكملة للنظام المصرفي الوطني، بل أيضا على أنها محاولة لسد الشريعة الإسلامية بالمؤسسات المالية الإسلامية. هذه القضية تصح من المهم للتحقيق لأن المؤسسات المصرفية في حاجة ماسة إلى هذا الأداء. وهكذا، في هذه الدراسة، سيتم النظر الى كفاءة الخدمات المصرفية الإسلامية من جوانبين: أولاً، استطاعة المصارف في توليد الناتج، يعني امكانيتها من الحصول على التمويل الرخيص. و الثاني، والكفاءة هي قضية تمكن ايضا ملاحظتها من خلال النظر في أداء البنك في تقليل مخاطر التمويل. احتتمت هذه الدراسة إلى أن الصعوبة الرئيسية في المصارف الإسلامية آتشيه هي عدم وجود ما يكفيها من المال الرخيص الذي يؤدي الى تخفيض الكفاءة بالنسبة الى التكاليف المطلوبة. ومع ذلك، فإن التقرير السنوي بين أصول

المصارف الإسلامية قد تطورت إيجابية وحيدة. وبالمثل، فإن نسبة من نسبة غير المسرحة (NPF) من المصارف الإسلامية تتسم بالكفاءة. وتحت هذه الدراسة على زيادة جمع التبرعات الرحيمة (الوديعة) لتحريض النمو الاقتصادي في المنطقة الساحلية الشمالية من إقليم اتشيه.

Abstrak: Perkembangan perbankan syariah di Aceh sudah sepatutnya mendapatkan perhatian lebih dikarenakan keberadaannya tidak hanya sekedar melengkapi struktur perbankan nasional namun juga sebagai upaya mengisi syariat Islam dengan institusi keuangan Islam. Persoalan efisiensi menjadi penting untuk diteliti mengingat institusi perbankan sangat membutuhkan kinerja ini. Maka, dalam studi ini, efisiensi pada perbankan syariah akan dilihat dari dua aspek: Pertama, kemampuan bank dalam menghasilkan output, dalam hal ini pembiayaan dengan cost (biaya) yang rendah. Kedua, efisiensi juga dapat dicermati dengan melihat kinerja bank dalam meminimalkan risiko dalam pembiayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesulitan utama bank syariah di Aceh adalah tidak memiliki dana murah yang cukup sehingga tingkat efisiensinya menjadi kurang bila efisiensi itu dibanding dengan biaya (cost) yang diperlukan. Walaupun begitu, laporan tahunan menunjukkan aset bank syariah berkembang positif dan baik. Demikian juga, rasio Non Performing Ratio (NPF) bank syariah sudah efisien. Penelitian ini merekomendasikan ditingkatkannya penggalangan dana murah (wadi'ah) untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan pantai utara Aceh.

Keywords: *efisiensi, funding, financing, Bank Syariah*

PENDAHULUAN

Struktur perbankan yang sehat dan sistem operasional yang efisien merupakan inti dari semua permasalahan perbankan, karena baik buruknya industri perbankan ditentukan oleh baik tidaknya struktur yang dibuat dan kebijakan-kebijakan operasionalnya yang efisien. Sebab itu, efisiensi bank merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisa *performance* suatu bank dan juga sebagai sarana untuk lebih meningkatkan efektifitas kebijakan moneter. Selain itu, efisiensi juga merupakan parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu yang mendasari seluruh kinerja sebuah

organisasi. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada merupakan ukuran kinerja yang diharapkan.

Karena itu, masalah efisiensi harus mendapatkan perhatian serius, terutama oleh pengelola bank syariah dalam rangka mendorong pengembangan industri perbankan syariah agar dapat menghasilkan kinerja yang baik, mempunyai daya saing yang tinggi dan memiliki pangsa pasar yang luas. Perbaikan efisiensi dapat dilakukan jika bank syariah dapat beroperasi dengan biaya yang paling minimum. Sebab penurunan *cost* (biaya) berdampak langsung pada peningkatan *return* bagi bank dan nasabah.

Dalam konteks Aceh, perbaikan kinerja perbankan syariah sangat penting ditengah-tengah *trade off* nasabah antara bank konvensional dan bank syariah. Nasabah cenderung memilih bank yang memiliki *return* tinggi dan kemudahan dalam mengakses dan bertransaksi. Alasan terakhir ini menjadi catatan tersendiri bagi perbankan syariah di Aceh. Sebab, keberadaan bank syariah di Aceh tidak hanya sekedar mengisi struktur perbankan nasional, namun juga sebagai upaya mengisi syariat Islam dengan institusi keuangan Islam. Karena perannya yang sangat penting dan strategis, perlu bagi perbankan syariah di Aceh untuk diperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh.

Penelitian tentang efisiensi perbankan syariah di Indonesia masih jarang dilakukan, tidak terkecuali di Aceh yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai negeri bersyariat. Berkaitan dengan itu, riset ini ingin mengungkapkan tentang tingkat efisiensi perbankan syariah di pesisir utara Aceh sebagai wilayah penting dalam pembangunan, yaitu Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara. Selain itu, riset tentang efisiensi bank syariah di Lhokseumawe dan Aceh Utara belum banyak dilakukan, sehingga riset ini sangat penting dilakukan untuk melihat efisiensi kinerja perbankan syariah sebagai lembaga intermediari yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir utara Aceh yang berasaskan Islam.

Dalam studi ini, efisiensi pada perbankan syariah dilihat dari beberapa aspek; *Pertama*, kemampuan bank dalam menghasilkan output, dalam hal ini pembiayaan dengan *cost* (biaya) yang rendah. *Kedua*, efisiensi juga dapat dicermati dengan kinerja bank dalam meminimalisir risiko dalam pembiayaan. Untuk memudahkan dalam pembahasan, masing-masing aspek itu dipecahkan menjadi dua sub

bahasan. Aspek pertama akan dikaitkan dengan rasio pendanaan-pembiayaan dan tingkat perkembangan aset. Sementara aspek kedua berkaitan dengan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan (*financing*) dan kemampuan bank dalam mengantisipasi risiko. Keempat sub bahasan itu sebagai indikator efisiensi perbankan syariah.

KAJIAN TEORITIS

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebab itu, masalah utama bank sebetulnya adalah berapa besar dana yang dapat dihimpun dan berapa lama dana akan mengendap. Tanpa dana, bank tidak dapat menjalankan fungsinya.

Bagi bank, dana merupakan uang tunai yang dimiliki dan dikuasai, baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai bank tidak hanya berasal dari pemilik, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana pihak ketiga yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, baik sekaligus maupun berangsur-angsur. Berdasarkan data empiris, selama ini dana yang berasal dari pemilik bank itu ditambah dengan cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali ke dalam bank rata-rata hanya sebesar 8 persen sampai 10 persen dari total aktiva bank.

Mengenai manajemen pendanaan sebagai upaya menghimpun dana dari pihak ketiga, bank syariah melakukan dengan bentuk:

1. Titipan (*wadiah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*), tetapi nasabah tidak dijanjikan mendapatkan imbalan atau keuntungan.
2. Simpanan partisipasi modal (ekulasi modal), yaitu partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non-guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/muḍārabah muṭlaqah*) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional kepada nasabah dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
3. Investasi khusus (*special investment account / muḍārabah muqayyadah*) di mana bank hanya bertindak sebagai manajer investasi yang hanya mendapatkan *fee* tanpa menanggung risiko

dari investasi tersebut. Sementara risiko sepenuhnya ditanggung oleh investor.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sumber dana bank syariah berasal dari:

1. Modal inti (*core capital*)
2. Kuasi ekuitas (*muqārabah account*)
3. Titipan (*wadi'ah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*).

Secara umum, efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*), atau jumlah yang dihasilkan dari suatu input yang dipergunakan.¹ Suatu perusahaan dapat dikatakan efisien apabila mempergunakan jumlah unit yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah unit *input* yang dipergunakan perusahaan lain untuk menghasilkan unit *output* yang sama, atau mempergunakan unit *input* yang sama dengan menghasilkan jumlah *output* yang lebih besar.² Efisiensi juga dapat didefinisikan sebagai rasio antara *output* dengan *input*. Ada tiga faktor yang menyebabkan efisien: *pertama*, apabila dengan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar. *Kedua*, *input* yang lebih kecil dapat menghasilkan *output* yang sama, dan *Ketiga*, dengan *input* yang lebih besar dapat menghasilkan *output* yang lebih besar lagi.

Efisiensi juga dapat dipahami sebagai tindakan yang tidak adanya pemborosan³ atau sebagai perbandingan antara output dengan input. Namun, bila ditinjau dari teori ekonomi, ada dua pengertian efisiensi, yaitu efisiensi teknik dan efisiensi ekonomi.⁴ Efisiensi ekonomi mempunyai sudut pandang makro yang jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan efisiensi teknik. Sementara, pengukuran efisiensi teknik cenderung terbatas pada hubungan teknis dan operasional dalam proses konversi *input* menjadi *output*. Akibatnya,

1 Priyonggo Suseno, "Analisa Efisiensi dan Skala Ekonomi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia," *Journal of Islamic Business and Economics*, 2 (Juni, 2008), 34.

2 S. Permono, Iswardono dan Darmawan, "Analisis Efisiensi Industri Perbankan di Indonesia (studi kasus bank-bank devisa di Indonesia Tahun 1991-1996)", *Ekonomi dan Bisnis Indonesia* (Yogyakarta: UGM, 2000), 45.

3 Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 1997), 94.

4 Muhammad Ghafur, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini* (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), 120.

usaha untuk meningkatkan efisiensi hanya memerlukan kebijakan mikro yang bersifat internal, yaitu dengan pengendalian dan alokasi sumberdaya yang optimal.⁵

Sementara, efisiensi dalam lembaga keuangan dapat dilihat dari *pertama*, efisiensi karena arbitrase informasi. *Kedua*, efisiensi karena ketepatan penilaian aset-asetnya. *Ketiga* adalah efisiensi karena lembaga keuangan bank mampu mengantisipasi resiko yang muncul, dan yang *keempat* adalah efisiensi fungsional, yaitu efisiensi berkaitan dengan administrasi dan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan. Efisiensi bank merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisa *performance* suatu bank dan juga sebagai sarana untuk lebih meningkatkan efektifitas kebijakan moneter. Namun, secara umum ada tiga pendekatan konsep dasar model efisiensi pada sektor finansial (perbankan), yaitu *cost efficiency*, *standard profit efficiency* dan *alternatif profit efficiency*. *Cost efficiency* pada dasarnya mengukur tingkat biaya suatu bank yang memiliki biaya operasi terbaik (*best practice bank cost*) yang menghasilkan *output* yang sama dengan teknologi yang sama. *Profit efficiency* menyangkut tingkat efisiensi dari kemampuan bank dalam menghasilkan laba untuk setiap unit input yang digunakan.

Berkaitan dengan tiga model pendekatan dalam melihat efisiensi, yaitu *cost efficiency*, *standard profit efficiency* dan *alternatif profit efficiency*, tingkat efisiensi bank syariah bisa dilihat dari dua sisi. *Pertama*, sisi pendanaan (*funding*) dan *kedua* sisi pembiayaan (*financing*). Secara sederhana, sisi pertama berkaitan dengan biaya (*cost efficiency*) yang diperlukan dalam pendanaan untuk dana pihak ketiga (DPK). Sementara, sisi kedua berkaitan dengan keuntungan (*profit efficiency*) yang diperoleh bank.⁶ Sisi pertama berkaitan dengan biaya (*cost*) yang dibutuhkan bank dalam merekrut dana pihak ketiga (DPK) yang ditandai dengan meningkatnya aset dan *market share*nya. Sementara, sisi *profit efficiency* menyangkut tingkat efisiensi dari kemampuan bank dalam menghasilkan laba untuk setiap unit input

5 Shafitranata, Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) dalam *Bahan-Bahan Terpilih dan Hasil Riset Terbaik Forum Riset Perbankan Syariah IV* (Desember, 2011), 39. Lihat juga Priyonggo Suseno, "Analisa Efisiensi dan Skala Ekonomi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia," *Journal of Islamic Business and Economics*, 2 (Juni, 2008), 34.

6 *Ibid.*, 35.

yang digunakan, termasuk kemampuan bank dalam meminimalisir risiko yang tercermin dari rasio *non performing financing* (NPF).

Berkaitan dengan istilah “biaya” (*cost*) atau imbal bunga (*rate*) yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam pencatatan akuntansinya sebagai kompensasi terhadap dana pihak ketiga, bank syariah tidak mengenal istilah bunga (*rate*) sebagai imbal dalam bank konvensional untuk nasabah yang menempatkan dananya pada bank syariah. Bagi bank syariah imbal untuk nasabah adalah bagi hasil dan bonus sebagai bentuk hubungan kemitraan dan penghargaan.

Bagi bank syariah, simpanan *wadi'ah* merupakan pendanaan yang paling prospek selain simpanan dengan akad *muḍārabah*. Pada simpanan *wadi'ah*, bank hanya “disunatkan” memberikan bonus bagi nasabah yang sudah menyimpan dananya. Sementara, simpanan *muḍārabah* bagi bank memiliki keleluasaan dalam pemanfaatannya. Keleluasaan itu terjadi karena sifat dari akad *muḍārabah* adalah kemitraan dan penyertaan. Karena itu, bagi nasabah yang menempatkan dananya pada bank syariah, dana itu dapat dicatat sebagai ekuasi modal (setara dengan modal). Sifat ini memungkinkan bagi bank untuk tidak berkewajiban membayar kembali dana nasabah bila bank mengalami kerugian dalam mengelola dana nasabah tersebut yang tidak disebabkan karena lalai atau curang. Karena itu, aspek *cost efficiency* bagi bank syariah dapat dilihat dari rasio pendanaan dan pembiayaan serta tingkat perkembangan aset dan *market share*nya.

Sementara, *profit efficiency* menyangkut tingkat efisiensi dari kemampuan bank dalam menghasilkan laba untuk setiap unit input yang digunakan, bagi bank syariah pendekatan ini sebagai aspek memaksimalkan laba dengan meminimalisir risiko. Risiko pada bank syariah berbeda dengan risiko pada bank konvensional. Risiko pada bank konvensional dihilangkan dengan sistem bunga (*rate*). Sementara, sistem bank syariah melarang bunga. Karena itu, sekali lagi menurut hemat kami, penempatan pembiayaan pada portofolio yang berbeda dengan akad yang berbeda pada perbankan syariah merupakan bagian dari pendekatan *profit efficiency* untuk meningkatkan laba dengan meminimalisir risiko pada perbankan syariah.

Selain itu, beberapa laporan tentang studi efisiensi perbankan menjelaskan bahwa bank dengan risiko yang besar (yang ditunjukkan dengan tingginya rasio NPL) cenderung tidak efisien. Bank dengan

tingkat efisiensi yang lebih tinggi akan melakukan evaluasi risiko kredit yang lebih baik. Bank yang mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam melakukan penjaminan dan pengawasan atas portofolio pinjaman secara relatif dalam jangka pendek menjadi tidak efisien, tetapi dalam jangka panjang menjadi lebih efisien melalui biaya kredit macet yang rendah.⁷ Karena itu, pada bank syariah, ukuran efisiensi dapat juga diukur dengan rasio *non performing financing* (NPF). Bank dengan tingkat NPF yang tinggi cenderung tidak efisien. Dalam hal ini bank syariah sebagai bank yang memiliki *exposure* yang tinggi terhadap risiko lebih memungkinkan lagi (*afdal*) menilai efisiensi melalui kendali risiko yang dapat dicermati dari tingkat pembiayaan yang bermasalah.

Namun, perlu disadari bahwa kolektabilitas bank syariah dengan bank konvensional sangat berbeda. Bank syariah memiliki peluang besar terhadap kegagalan kolektabilitasnya apabila ada pembiayaan dalam jumlah besar dengan skim PLS (*profit and loss sharing*). Keterlambatan pembayaran dengan skim ini, meskipun satu hari, BI akan mencatatnya sebagai pembiayaan dalam perhatian khusus. Sebab itu, kolektabilitas bank syariah sangat riskan terhadap risiko. Karena itu, sangat memungkinkan NPF pada bank syariah menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat efisiensi. Skalanya dapat menggunakan ketentuan BI yang menyatakan bahwa sebuah bank termasuk dalam kategori sehat bila rasio NPF berada di bawah 5 persen. Artinya, semakin kecil rasio NPF maka semakin baik *rating* efisiensinya. Karena itu, bagi bank syariah yang mampu menekan angka rasio pembiayaan bermasalah berarti memiliki tingkat efisiensi yang paling baik. Ini adalah salah satu standar lain yang juga kita gunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pada bank syariah.

Karena itu, menurut hemat penulis, tingkat efisiensi bank syariah dapat dilihat dari empat sisi sebagai indikator efisiensi perbankan syariah, *Pertama* kemampuan dalam merealisasikan pendanaan dan pembiayaan dibanding dengan biaya (*cost*) yang digunakan. *Kedua*, tingkat perkembangan aset bank dan *market share* bank syariah. *Ketiga*, kemampuan bank dalam merealisasikan pembiayaan, dan *keempat*, kemampuan bank dalam mengantisipasi risiko yang muncul dalam pembiayaan.

7 Enri, "Evaluasi Efisiensi Teknik Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Two-Stage Data Envelopment Analysis," dalam *Bahan-Bahan Terpilih dan Hasil Riset Terbaik Forum Riset Perbankan Syariah III* (September, 2011), 276.

Untuk mengungkap problem akademik dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode riset yang disepakati sebagai metode untuk penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode disini melingkupi pendekatan yang digunakan, metode pengambilan data dan analisis.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Lhokseumawe. Peneliti menganggap bahwa wilayah Kota Lhokseumawe merupakan pusat aktifitas ekonomi penting di pantai utara Aceh. Karena itu, Kota Lhokseumawe dianggap cukup memadai untuk dilakukan riset ini. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survey, di mana peneliti akan terlibat langsung di lapangan untuk memperoleh data. Karena itu, penelitian ini bersifat *eksploratif*. Sementara, data penelitian yang diperoleh dijelaskan secara deskriptif, karena itu dari segi analisis data penelitian ini termasuk dalam penelitian *deskriptif-eksploratif*.

Sementara, sumber data dalam penelitian akan dipilih para *stakeholder* yang berkaitan dengan perbankan syariah. Di antaranya adalah *stakeholder* perbankan syariah di Lhokseumawe dan Kantor Bank Indonesia (BI) Cabang Lhokseumawe. Ada dua bentuk data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder. *Pertama*, data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh di lapangan,⁸ yaitu data yang diperoleh dari sumber data di lapangan yang berkaitan dengan objek materiil dalam penelitian ini, yaitu efisiensi perbankan syariah. Data penting yang diharapkan di sini adalah informasi⁹ tentang kemampuan bank dalam pendanaan dan pembiayaan berupa laporan bank yang melingkupi laporan keuangan, aset, pendanaan, pembiayaan dan risiko. *Kedua*, data sekunder yaitu data yang telah tersedia¹⁰ berupa laporan penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data sekunder ini diperlukan untuk mendukung atau memberi informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder itu diperoleh dari jurnal, laporan penelitian baik yang dipublikasikan maupun tidak, buku-buku dan juga artikel-artikel yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

8 Mujrat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi; Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis* (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 127.

9 Dalam penelitian Kualitatif tidak digunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial itu dinamakan dengan objek penelitian. Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2007), 215.

10 Kuncoro, *Metode*, 127.

Untuk memperoleh data dimaksud, peneliti ini menggunakan wawancara mendalam (*indept interview*) dan dokumentasi.¹¹ Wawancara mendalam dilakukan dengan santai (informal) untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut berkaitan sistim pengelolaan manajemen untuk pendanaan dan pembiayaan sekaligus juga cara-cara yang ditempuh untuk meminimalisir risiko. Sementara, dokumentasi digunakan untuk menyerap informasi tentang pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah. Beberapa arsip penting seperti hasil penelitian terdahulu baik yang dimuat dalam jurnal, laporan penelitian baik yang dipublikasi atau tidak, buku-buku dan juga artikel-artikel yang memiliki kaitan dengan penelitian ini akan ditelaah sedemikian rupa untuk meningkatkan pemahaman serta tambahan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas. Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi, yaitu dipola dan kategorikan untuk memilih dan memilah antara yang penting dan tidak. Selanjutnya, setelah melihat dan memilih data yang penting dan berkaitan, data itu didisplaykan dalam pola dan model yang lebih sistematis dalam bentuk tabel agar memudahkan dalam menganalisisnya. Untuk melihat tingkat efesiensi pendanaan dan pembiayaan pada perbankan syariah, suguhan data dimodelingkan. Data dianalisa dengan metode analisa investasi fundamentalis dan analisa *times series*. Meskipun demikian, semua tahapan itu juga dianalisis secara *deskriptif-analitis*.

EFISIENSI KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI LHOKSEUMAWE DAN ACEH UTARA

Secara umum bank akan memiliki tingkat efesiensi yang baik bila dana pihak ketiga (DPK) diperoleh dengan biaya murah. Dalam hal ini, dana DPK murah terdapat pada akad *wadi'ah*. Simpanan *wadi'ah* tidak mengharuskan bank untuk membagikan hasil, hanya bonus bila bank bermurah hati kepada nasabah. Efisiensi perbankan dapat dilihat dari realisasi pendanaan dan pembiayaan dengan analisa perkembangan secara periodik (*time series*). Perkembangan dan peningkatan bank dalam pendanaan dan pembiayaan dalam suatu periode akan menginformasikan tingkat efesiensi sumberdaya bank

11 Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 15.

tersebut. Sementara, kemampuan bank dalam merealisasi pembiayaan dapat diukur berdasarkan perkembangan rasio FDR (*Financing Deposit Ratio*) perbankan syariah. Mengenai risiko pada bank syariah diantaranya dapat dilihat dari rasio NPF (*Non Performing Ratio*). Bila bank memiliki tingkat rasio NPF melebihi 5 persen, bank tersebut termasuk ke dalam kategori kurang sehat. Itu berarti, bank kurang efisien dalam mengalokasikan pembiayaan. Dampak lain dari meningkatnya NPF adalah terkurasnya aset yang berimplikasi pada penyusutan rasio modal (CAR) sebagai salah satu indikasi kesehatan bank yang berbanding dengan ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko).

Berkaitan dengan studi efisiensi pada bank syariah seperti yang diuraikan sebelumnya, sebetulnya efisiensi dapat dicermati dari dua aspek besar, *pertama*, kemampuan bank dalam menghasilkan *output*, dalam hal ini pembiayaan dengan *cost* (biaya) yang rendah. *Kedua*, kinerja bank dalam meminimalisir risiko dalam pembiayaan. Untuk lebih sistematis dan memudahkan dalam pembahasan, dua aspek besar di atas itu masing-masing dipecahkan menjadi dua sub bahasan. Efisiensi pada aspek pertama akan dikaitkan dengan rasio pendanaan-pembiayaan dan perkembangan aset. Sementara efisiensi pada aspek kedua berkaitan dengan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan (*financing*) dan kemampuan bank dalam mengantisipasi risiko. Karena itu agar lebih jelas, keempat sub bahasan di atas sebagai indikator efisiensi perbankan syariah akan diuraikan berikut ini.

1. Rasio pendanaan dan pembiayaan

Dana pihak ketiga yang murah adalah giro, sebab ia berakad *wadi'ah yad al-amanah*.¹² Bank dapat dengan mudah memanfaatkan dana ini untuk kegiatan komersial tanpa ada kewajiban pemberian imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening *wadi'ah*. Namun demikian, atas kehendaknya bank dapat memberikan imbalan atau bonus (*hibah*) kepada pemilik dana. Oleh karena

¹² Akad *wadi'ah* ada dua macam, yaitu *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah yad amanah*. Simpanan dengan akad model pertama memungkinkan bank untuk memanfaatkan dana simpanan itu pada kegiatan komersial bank. Sementara, dalam akad model yang kedua, bank tidak dibenarkan memanfaatkannya, sebagai kompensasi penjagaan atas titipan, bank akan mengenakan biaya simpanan yang harus dibayarkan nasabah kepada bank. Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, cet. 2 (Yogyakarta: Ekonisia: 2005), 53.

itu, dana ini bagi bank akan memberi dampak pada peningkatan profitabilitas, meskipun dana ini memiliki tingkat likuiditas yang tinggi bagi nasabah, dengan usia simpanan yang pendek.

Berdasarkan data BI, Rasio DPK pada perbankan syariah di Lhokseumawe dan Aceh Utara yang bersumber dari giro memiliki porsi baik di atas 10 persen dan trennya meningkat. Tahun 2008, DPK dari giro sebesar 11 persen dibandingkan dengan keseluruhan dana DPK. Pada tahun 2009, dana tersebut meningkat menjadi 19 persen dan pada pertengahan 2011 mengalami penurunan pada 13 persen. Hal ini menunjukkan bank syariah memiliki dana murah untuk membiayai asetnya baik yang *earning* maupun yang *non-earning* di atas 10 persen. Sementara, tabungan memiliki porsi terbesar, berturut-turut dari 2008 hingga 2011 yaitu 78 persen, 62 persen, 63 persen dan 61 persen.¹³ Tabungan dan giro sama-sama sebagai dana murah bagi perbankan, kecuali deposito. Tabungan *muḍārabah* bagi bank syariah dapat dianggap sebagai kuasi modal, sebab akad *muḍārabah* merupakan akad penyertaan modal. Dalam fiqh muamalah, orang yang menyertakan modal dalam suatu usaha (*ṣāhib al-māl*) tidak dapat meminta kembali dananya yang sudah diserahkan kepada mitranya (*muḍārib*) bila usaha tersebut mengalami kebangkrutan. Kecuali, jika dapat dibuktikan bahwa *muḍārib* berlaku curang atau lalai hingga usaha dan modal menjadi rusak. Dalam hal ini, posisi bank adalah sebagai *muḍārib*. Oleh karena itu, bank memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan dana pihak ketiga yang berakad *muḍārabah*. Apalagi pada akad *muḍārabah muṭlaqah*, dimana bank tidak hanya memiliki kemudahan dalam menggunakan dana tersebut, namun juga keleluasaan dalam menggunakannya. Bank tidak hanya terikat pada satu sektor tertentu, tetapi dapat diinvestasikan dalam beragam sektor.

Pada sisi pendanaan, secara sistemik bank syariah memiliki peluang besar untuk mendapatkan dana murah. Efisiensi sistemik itu diperoleh dari sifat elastisitas yang melekat pada akad-akad bank syariah. Pendanaan dengan akad *wadi'ah*, misalnya, bank tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bagian laba dari aktifitas komersil tersebut. Selain itu, bila dana pihak ketiga berasal dari simpanan *muḍārabah*, maka dana itu dapat dicatat sebagai ekuasi modal bagi bank. Ketika dana simpanan berstatus simpanan *muḍ*

13 Bank Indonesia, *Data Bank Secara Keseluruhan di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, Lhokseumawe* (Lhokseumawe: 2011).

arabah, maka bank lebih leluasa dalam menggunakannya untuk pengembangan usaha. Karena itu, bagi bank syariah, biaya (*cost*) dalam pendanaan pada bank syariah setara dengan deviden bagi pemegang saham dalam satu perusahaan. Sebab itu, dari segi pendanaan bank syariah sangat efisien. Perkembangan dana pihak ketiga (DPK) dalam aplikasi pendanaan perbankan syariah yang dilakukan melalui simpanan giro, deposito dan tabungan dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

Tabel 1: Rasio Pendanaan Bank Syariah

No	DPK	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Giro	11%	19%	13%	13%
2	Depositi	11%	19%	24%	27%
3	Tabungan	78%	62%	63%	61%

Sumber: Data dari Bank Indonesia, data diolah.

Pada sisi pembiayaan, bank syariah memiliki 5 model akad pembiayaan, yaitu *musharakah*, *muḍarabah*, *piutang murabahah*, *istiṣnā'* dan *qard*. Namun, pembiayaan dengan skim *muḍarabah* yang dianggap sebagai pilot projek sebagai bank bagi hasil justru memiliki porsi yang sangat kecil dalam pembiayaan. Selain itu, kelihatannya semakin lama *trennya* semakin menurun. Pada tahun 2001, realisasi pembiayaan *muḍarabah* mencapai 3,70 persen, 2003 menurun menjadi 1,3 persen dan pada 2006 pembiayaan ini tinggal 0,7 persen, meskipun akhir tahun 2007 naik sedikit ke posisi 2,8 persen.¹⁴ Hal ini menunjukkan pembiayaan *muḍarabah* yang berbasis bagi hasil dihindari bank karena memiliki risiko tinggi meskipun pembiayaan ini adalah pembiayaan yang memiliki dampak langsung pada sektor riil. Di sini hendaknya bank syariah lebih memodifikasi pembiayaan model PLS (*profit and loss sharing*) mengingat cita-cita awal dari pendirian bank syariah adalah agar terealisasi sistem bagi hasil sebagai upaya alternatif mengganti sistem bank yang berbasis pada bunga.

Secara global, dapat juga dilihat dari berbagai laporan penelitian bahwa pembiayaan *muḍarabah* terus tereduksi oleh pembiayaan lain yang lebih menguntungkan, baik dari segi risikonya yang sedikit dan juga ke-

14 Data dari Bank Indonesia 2011.

untungan yang menjanjikan seperti pada pembiayaan yang berbasis jual beli *murabahah*. Sebetulnya pembiayaan *muḍarabah* memiliki peluang yang baik dan menjanjikan sebagai basis pemberdayaan ekonomi ummat, namun sayang bank syariah tidak sungguh-sungguh dalam memodifikasi pembiayaan yang berisiko ini. Bank cenderung memilih pembiayaan tanpa risiko sehingga perbankan terjebak pada pembiayaan konsumtif yang akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ketidaksungguhan itu dapat dipahami dari terus merosotnya pembiayaan dengan skim PLS yang hanya 17,6 persen dibandingkan dengan total pembiayaan bank. Sementara risiko mencapai 19,6 persen dibandingkan dengan keseluruhan risiko pada perbankan syariah.¹⁵ Sementara, manajemen risiko sebagai upaya penanggulangan kerugian tidak dimodifikasi. Sampai sekarang, secara keseluruhan bank syariah belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) tersendiri dalam manajemen risiko pembiayaan.¹⁶ Bank syariah menggunakan standar manajemen risiko bank konvensional turunan dari BASEL II, padahal terdapat banyak perbedaan risiko antara bank konvensional dengan bank syariah yang tidak mungkin dapat dipertukarkan dengan bank konvensional. Di sini dapat dinyatakan bahwa pada sisi pembiayaan, bank syariah memiliki peluang risiko yang sangat besar. Pada tahap pembiayaan ini, bank syariah bukanlah bank yang efisien.

Karena itu, bank syariah harus memiliki regulasi dan institusi penjamin pembiayaan bank syariah; mengingat keunikan risiko dan model pendanaan dan pembiayaan. Institusi itu harus segera diwujudkan agar setiap masalah yang akan muncul segera dapat ditangani dengan baik. Lembaga itu juga akan memberikan dampak positif terhadap upaya akselerasi pengembangan bank syariah agar dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, lembaga ini berfungsi sebagai asuransi aktif yang ikut mengevaluasi, memonitor usaha-usaha yang pembiayaannya berbasis *shirkah*.

Lembaga penjamin pembiayaan merupakan lembaga bersama yang disupport oleh perbankan, Bank Indonesia (BI) dan juga pemerintah dalam bentuk advokasi, subsidi dan manajerial. Subsidi

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hasil wawancara dengan Mutia Kasie Pendanaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cab. Lhokseumawe Tanggal, 10 Oktober 2011.

ini penting sebagai biaya talangan bagi perbankan yang memiliki nasabah gagal bayar (*default*). Dana talangan itu berasal dari *qard*, zakat dan klaim asuransi pada asuransi syariah. Pemanfaatan dana *qard* dan zakat sebagai dana talangan harus mendapat pengawasan Badan Arbitrase, Dewan Syariah dan Bank Indonesia. Lembaga inilah yang diperlukan agar bank lebih ekspansif dalam merealisasikan pembiayaan berbasis PLS yang notabenehnya sebagai pembiayaan pada sektor riil yang memberdayakan.

2. Tingkat perkembangan aset

Ada dua hal yang akan dianalisis di sini terkait dengan efisiensi bank syariah, yaitu perkembangan aset dan *market share*. Pada juli 2008, terjadi peningkatan aset bank secara drastic, yaitu dari 34.936 juta menjadi 52.545 atau meningkat sebesar 66,4 persen. Pertumbuhan ini disebabkan oleh pembukaan unit baru bank syariah di Kota Lhokseumawe. Namun, pertumbuhan itu tidak diiringi oleh ekspansi pembiayaan. Pembiayaan masih berkisar pada 31,176 juta yang sebelumnya pada bulan Juni, pembiayaan sebesar 27,333 atau hanya selisih 3,843 juta.¹⁷ Hal ini disebabkan oleh kebijakan internal bank yang cenderung menempatkan dananya pada SBI ketimbang melakukan pembiayaan. Kebijakan ini disebabkan arena iklim investasi sektor riil yang kurang menguntungkan dan juga isu krisis global yang menerpa Eropa. Stagnansi pembiayaan ini masih bertahan hingga akhir tahun, meskipun pada Desember 2008 aset bank syariah mencapai 109,678 juta. Hal seperti ini masih berlanjut hingga awal tahun 2009.¹⁸

Pada medium 2009, pendanaan bank syariah terlihat menurun dari 90,514 juta pada Juni 2009 menjadi 80,691, artinya pertumbuhan minus sampai -0,89 persen. Penurunan pendanaan ini disebabkan karena mayoritas deposito jatuh tempo. Selain itu, dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami penurunan. Penurunan itu disebabkan proyek NGO dan LSM mulai berakhir di pantai utara Aceh. Selain itu secara makro juga disebabkan oleh sentimen pasar dengan bunga acuan BI (*BI rate*) yang sudah diturunkan pada 2008,

17 Sumber data dari Bank Indonesia, data diolah.

18 Mengenai kondisi stagnasi investasi pada sektor riil di Aceh, sempat juga dikomentari oleh Kepala BPK Anwar Nasution yang menyatakan bahwa rakyat Aceh makan riba. Statemen ini muncul karena perbankan di Aceh terlalu banyak menempatkan dananya pada SBI.

sehingga bunga deposito menurun. Sentimen ini berpengaruh secara makro hingga pada perbankan syariah. Kebijakan itu berimbas pada berkurangnya dana DPK pada bank syariah. Nasabah cenderung berinvestasi sendiri dengan membeli emas.¹⁹

Tahun 2010, ekspansi pembiayaan bank syariah sangat ekstrim. Bank syariah sangat ekspansif dalam mengeluarkan pembiayaan. Hal ini ditandai dengan grafik pembiayaan sangat curam melampaui pendanaan. Ekspansi pembiayaan secara besar-besaran ini terjadi disebabkan penurunan bunga acuan BI (*BI rate*) pada 2008 yang berimbas pada penekanan bunga dan *profit margin* pada pertengahan tahun 2010. Namun yang meningkat adalah pembiayaan konsumtif yang banyak diserap oleh PNS dengan skim pembiayaan *murabahah*.²⁰

Pembiayaan tersebut stabil pada periode awal tahun hingga pertengahan tahun 2011. Meskipun grafik pendanaan pada Mei terlihat menurun dari 156,776 pada Maret menjadi 149,782 pada Mei 2011. Sementara, pembiayaan melaju secara positif, secara keseluruhan pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah berjalan normal dan mengalami pertumbuhan secara positif. Jika dibandingkan pertumbuhan pendanaan dan pembiayaan sejak 2008 hingga pertengahan 2011, bank syariah mengalami pertumbuhan sampai 41 persen pertahun.²¹

Sementara, *market share* bank syariah dapat diamati dari suguhan data berikut ini. Pada Desember 2008, *market share* perbankan syariah berkisar 3,25 persen, dengan aset Rp. 109,678 juta. Kemudian, pada Desember 2009, *market share* meningkat menjadi 5,73 persen, sementara satu tahun berikutnya mencapai 7,93 persen. Pada Desember 2011, *market share* perbankan syariah mencapai 10,99 persen.²² Pertumbuhan *market share* itu di atas target perbankan syariah secara nasional yang berkisar 6 persen saja. Rata-rata *market share* tumbuh 2,58 persen pertahun. Data ini menunjukkan kinerja bank syariah baik. Bila kondisi ini bertahan saja, maka bank syariah

19 Wawancara dengan Mutia, Kasie pendanaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cab. Lhokseumawe, tanggal 10 Oktober 2011.

20 Hasil wawancara dengan Muslim, Costumer Servis dan Irna Malinda, Kasie pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cab. Lhokseumawe, 14 Oktober 2011.

21 Data olahan dari Data Bank Indonesia Kantor Bank Indonesia Lhokseumawe, 2011.

22 Data dari Bank Indonesia Kantor Bank Indonesia Lhokseumawe, 2011.

membutuhkan waktu 12 tahun untuk memperoleh 50 persen *market share* secara keseluruhan di Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Secara umum, data-data di atas menginformasikan bahwa aset perbankan syariah di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah berjalan normal dan mengalami pertumbuhan secara positif. Pertumbuhan aset bank syariah pada awal 2008 sebesar 14,578 juta meningkat menjadi 501,431 pada Agustus 2011. Artinya, sejak 3 tahun terakhir terjadi lonjakan aset bank syariah sebesar 486,853 juta, atau terjadi pertumbuhan sebesar 34,4 kali. Sementara, *market share* perbankan syariah tumbuh rata-rata pertahun sebesar 2,58 persen. Dari data ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *cost efficiency* berlaku pada perbankan syariah.

3. Kemampuan Bank dalam Menyalurkan Pembiayaan

Berkaitan dengan tingkat efisiensi pada pembiayaan, riset ini menggunakan rasio FDR (*finacing deposit ratio*) atau rasio kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan (*financing*) sebagai indikator efisiensi pada perbankan syariah. Data yang diperoleh mengenai tingkat FDR bank syariah di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara menunjukkan angka yang positif. Rasio FDR pada bank syariah mencapai 253,62 persen pada Desember 2011. Angka ini melampaui kebiasaan pada bank konvensional yang berkisar 126,67 persen pada Desember 2010 dan 136,73 pada Desember 2011 dengan tingkat rasio NPLnya mencapai 11,79 persen.²³

Di satu segi, pertumbuhan ini sangat menggembirakan, sebab rasio FDR yang positif menunjukkan penyaluran kembali dana nasabah kepada masyarakat sebagai salah satu peran penting bank sudah berjalan baik. Namun, bila FDR nya terlalu tinggi juga meresahkan. Keresahan ini disebabkan oleh beberapa alasan:

- a. FDR yang terlalu tinggi menyebabkan bank sangat terbuka terhadap risiko *default* (gagal pembiayaan) akibat pembiayaan macet.
- b. FDR yang tinggi pada sektor konsumtif menjadi salah satu faktor pemicu tingginya inflasi.

23 Data keseluruhan dari BI. Namun ada salah satu bank dengan tingkat FDRnya sangat tinggi. Data rasio FDRnya dimulai Februari 2011 berturut-turut sampai September, berikut data dimaksud: 383,68%, 436,84%, 473,52%. 408,96%. 451,43%, 460,42%, 446,36%. 458,90%.

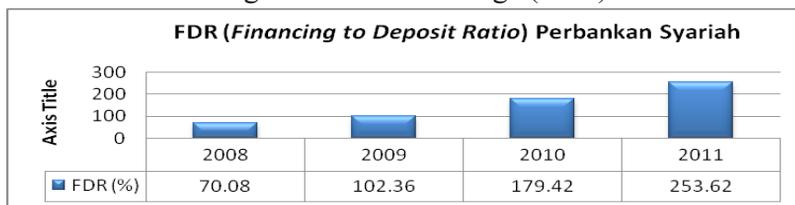
- c. FDR yang terlalu tinggi untuk pembiayaan konsumtif menyebabkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang melemah.

Kekhawatiran terhadap inflasi dan melemahnya daya beli masyarakat yang berimbas pada melemahnya perekonomian jangka panjang dipicu oleh tiadanya filter yang tegas dari penguasa moneter (BI). Beberapa kebijakan yang sejatinya menjadi instrumen devaluasi juga sudah tidak lagi diefektifkan. Beberapa kebijakan penting itu adalah:

- a. Politik diskonto, yaitu penetapan tingkat bunga kredit.
- b. Penetapan pagu kredit, yaitu melalui penetapan batas maksimum kredit.
- c. *Selected credit control*, yaitu melalui pembatasan pemberian kredit secara sektoral.

Namun sayang, ketiga kebijakan strategis itu tidak lagi diefektifkan sejak 1 juni 1983. Bank sentral hanya memiliki kebijakan kontrol FDR untuk memonitoring perkembangan pembiayaan. Menurut ketentuan Bank Indonesia (bank sentral), lazimnya FDR berkisar pada 90 sampai dengan 100 persen .²⁴ Sementara rasio FDR sampai dengan September 2011 sebesar 253,62. Hal ini menunjukkan pembiayaan yang dilakukan bank syariah sudah melampaui ketentuan BI,

Tabel 2. Rasio Pembiayaan dibandingkan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK)



Sumber: Bank Indonesia, data di olah.

4. Kemampuan bank dalam mengantisipasi risiko pembiayaan

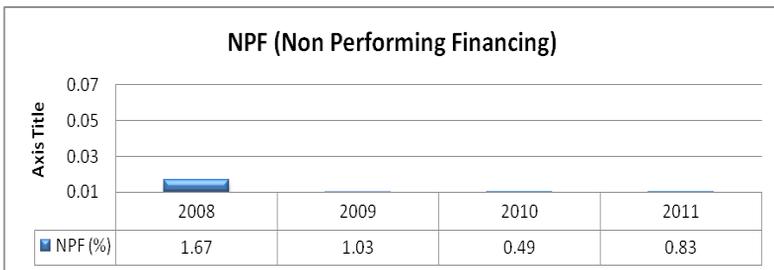
Pada awal pembukaan bank syariah, tingkat pembiayaan bermasalah sangat tinggi. Tingginya pembiayaan bermasalah (*Non Performing*

²⁴ Bacruddin, Manajemen *Dana Bank Syariah: Konsep dan Analisis*, Bahan Kuliah pada UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2008), 21.

Financing) karena bank syariah sangat ekspansif dalam menyalurkan pembiayaan *muḍārabah* yang berbasis pada *profit and loss sharing* yang memiliki tingkat risiko tinggi. Pembiayaan *mushārahah* dan *muḍārabah* sebagai kontributor terhadap tingginya NPF sejak awal pembiayaan dilakukan.²⁵ Karena itu, secara umum bank syariah memiliki tantangan besar dalam memilih skim pembiayaan. Jika bank hanya berkuat pada pembiayaan *murabahah* yang memiliki risiko rendah, maka peran bank syariah tidak maksimal untuk pemberdayaan ekonomi, sebab pembiayaan *murabahah* cenderung konsumtif. Namun, bila pembiayaan dikonsentrasikan pada pembiayaan berbasis PLS, maka NPFnya meningkat.

Berkaitan dengan NPF (*non performing ratio*), laporan terakhir pada pertengahan triwulan ketiga 2011, rasio NPF perbankan syariah sangat mengembirakan. Namun kecilnya rasio NPF ini disebabkan oleh besarnya alokasi pembiayaan pada skim *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* tergolong dalam pembiayaan aman dengan tingkat risiko kecil.²⁶ Pembiayaan *murabahah* tidak memiliki risiko akad seperti pada pembiayaan PLS, pembiayaan ini hanya memiliki risiko pasar yang dapat ditanggulangi dengan penetapan margin dan risiko legalitas. Risiko legalitas ini terjadi manakala nasabah terlambat membayar hutang. Terhadap keterlambatan ini bank tidak dapat mengambil tindakan hukum. Selain itu, bila nasabah terlambat membayar hutang akadpun tidak cacat.²⁷

Tabel 3: Rasio Pembiayaan yang Bermasalah pada Perbankan Syariah



Sumber: Data dari Bank Indonesia, data diolah.

25 Bank Indonesia, *Data Bank Secara Keseluruhan*.

26 Wawancara dengan Fitri, Kasie Pembiayaan BPRS Hijrah Rahmat Agung Lhoseumawe, Tanggal 7 Oktober 2011.

27 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, Cet. I, (Jakarta: Serambi, 2007), 201-206, 232.

Grafik di atas menunjukkan penurunan rasio NPF bank syariah. Penurunan rasio NPF ini terjadi karena ada pengalihan pembiayaan dari pembiayaan yang berisiko ke pembiayaan murabahah. Sekilas, kondisi ini menunjukkan manajemen pembiayaan sudah berjalan baik, dimana risiko *moral hazard* dan gagal bayar (*default*) dalam pembiayaan dapat ditekan hingga 0,83 persen pada September 2011. Angka perbandingan antara total gagal bayar dengan total pembiayaan ini jauh dari batas maksimal NPF yang dapat ditolerir BI, yaitu 5 persen. Namun, kecilnya NPF ini tidak diimbangi dengan kebijakan pengalokasian pembiayaan pada sektor riil. Pembiayaan pada skim yang berbasis PLS hanya 17,2 persen terdiri dari pembiayaan musharakah 14,5 persen dan pembiayaan *muḍārabah* 2,8 persen. Sementara, rasio pembiayaan dengan skim *murabahah* (jual beli) mencapai 82 persen.

Di sini kelihatannya bank syariah menggunakan metode klasik untuk memperkecil risiko dan NPF dalam pembiayaan, yaitu dengan menghindari risiko. Bank syariah lebih memilih mengambil pembiayaan *murabahah* dari pada penguatan manajemen risiko pada pembiayaan *muḍārabah* yang berbasis bagi hasil. Bank syariah terkesan menghindari pembiayaan dengan skim PLS yang memiliki risiko bawaan; risiko akaq²⁸, risiko *adverse selection* dan *moral hazard* sebagai konsekwensi dari *assymetry information* dalam pembiayaan berbasis PLS.

Bila data ini digunakan untuk menjastifikasi efisiensi bank syariah tentang kemampuannya meminimalisir risiko tanpa terlebih dahulu memperhatikan dengan jeli terhadap model akad dalam pembiayaan, maka kesimpulan kita adalah bank syariah sangat efisien. Namun sebetulnya, bank syariah sedang mencari titik aman dan jalan pintas untuk dikatakan efisien dan sehat secara legalitas hukum dengan suguhan rasio NPF 0,82 persen, meskipun telah mem-

28 Risiko bawaan dimasad adalah pembiayaan yang berbasis PLS seperti pembiayaan *muḍārabah* dan musharakah dimana akadnya berbasis pada kepercayaan dan kemitraan. Artinya, akad itu berkonsekwensi pada hubungan antara *ṣāḥib al-māl* (pemilik modal) dengan *muḍārib* (pengelola modal) dengan ikatan kemitraan dan kepercayaan sehingga *ṣāḥib al-māl* kehilangan hak kontrol terhadap manajemen usaha yang sedang dijalankan *muḍārib*, kecuali skim musharakah dimana kedua pihak sama-sama berkerja dan sama-sama mengeluarkan modal. Namun, dalam skim pembiayaan *muḍārabah*, *muḍārib* berhak mengelola sepenuhnya terhadap modal yang telah diberikan oleh *ṣāḥib al-māl* (pemilik modal). Kondisi inilah yang menyebabkan timbulnya *moral hazard*.

belokkan pembiayaan yang berbasis bagi hasil ke pembiayaan yang berbasis utang (*murabahah*). Padahal, sesungguhnya, bank syariah itu adalah bank dimana basis operasionalnya harus lebih didominasi akad *profit and loss sharing* (bagi hasil). Bila dimulai dari sini, maka bank syariah menjadi telah bermuka dua. Muka pertama yang tidak efisien disembunyikan, yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil yang penuh risiko, sementara muka kedua dengan NPF 0,82 ditampakkan yang diperoleh dari pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah*).

Risiko pada pembiayaan yang berbasis bagi hasil sebetulnya dapat diminimalisir namun membutuhkan biaya (*cost*) tinggi.²⁹ Biaya tinggi ini menjadi salah satu pertimbangan bank, di mana biaya tinggi akan mengancam profitabilitas bank. Karena itu, mengenai alasan tingginya risiko pada pembiayaan berbasis PLS yang menyebabkan tingginya NPF, bank syariah harus berperan aktif memperbaiki manajerial; baik majemen operasional dan juga peningkatan SDM-nya. Upaya ini penting agar perbankan syariah lebih santun, bersahaja dan inovatif.

PENUTUP

Dari uraian dan pembahasan di atas mengenai studi efisiensi pada perbankan syariah di Lhokseumawe dan Utara, berikut ini beberapa kesimpulan dan saran:

1. Ketika dana simpanan berstatus simpanan *muḍārabah*, maka bank lebih leluasa dalam menggunakannya. Sementara, biaya (*cost*) dalam pendanaan ini bagi bank syariah setara dengan deviden bagi pemegang saham. Sebab itu, dari segi pendanaan, bank syariah sangat efisien. Namun dari sisi pembiayaan

²⁹ *Assymetry Information* adalah ketidakjelasan informasi tentang objek pembiayaan. *Assymetry information* disebabkan oleh *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* merupakan kekaburan informasi yang sebenarnya atau informasi tersembunyi tentang calon *muḍārib* atau *mushārik* dalam pembiayaan berbasis PLS. Dalam manajemen risiko, kekaburan ini dapat ditanggulangi dengan penyeleksian berkas dan kelengkapan semua data-data yang berkaitan dengan calon *muḍārib* atau *mushārik*. Data itu dapat dibaca pada berkas yang dilampirkan dan juga dapat dikonfirmasi kepada teman atau orang-orang yang mungkin mengenal *muḍārib* lebih dekat. Sementara, risiko moral dapat ditanggulangi dengan monitoring baik dengan cara *on side* (meriksa laporan saja) ataupun *off side* (turun ke lapangan memonitoring) kegiatan usaha *muḍārib*. Untuk melakukan semua ini, dibutuhkan biaya tinggi (*cost*). Lihat Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah*., 101-102. Lihat juga; Iskandar, *Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Aceh Cabang Lhokseumawe*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), 42. Lihat juga; Zaenal Arifin, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 122.

sebetulnya bank syariah memiliki peluang risiko yang sangat besar. Pada tahap pembiayaan, bank syariah bukanlah bank yang efisien.

2. Sejak 2009 sampai dengan 2011, aset bank syariah tumbuh sebesar 34,4 kali. Sementara *market share* rata-rata mengalami peningkatan sebesar 2,58 persen pertahun, karena itu *cost efficiency* berlaku pada perbankan syariah.
3. Rasio FDR pada bank syariah pada Desember 2011 mencapai 253,62 persen. Angka ini melampaui bank konvensional dengan LDR 126,67 persen pada Desember 2010 dan 136,73 pada Desember 2011 serta rasio NPLnya mencapai 11,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih efisien ketimbang bank konvensional di Lhoseumawe dan Aceh Utara.
4. Di sisi lain sebetulnya bank syariah mencari titik aman dan jalan pintas untuk dikatakan efisien dan sehat secara legalitas hukum dengan suguhan rasio NPF 0,82 persen dengan membelokkan pembiayaan yang berbasis bagi hasil ke pembiayaan yang berbasis utang (*murābahah*). Padahal, sesungguhnya bank syariah itu adalah bank dimana basis operasionalnya harus lebih dominan akad *profit and loss sharing* (bagi hasil). Bila ditilik dari sini, maka bank syariah menjadi telah bermuka dua.
5. Manajemen bank syariah harus meningkatkan SDM dan segera memformulasikan manajemen risiko ala bank syariah agar risiko pada pembiayaan yang berbasis PLS dapat ditanggulangi.
6. Diharapkan kepada *stakeholder* bank syariah agar dapat meningkatkan inovasi produk, baik pendanaan maupun untuk pembiayaan. Inovasi ini penting agar bank syariah lebih kompetitif dalam meningkatkan *marketsharnya* dengan bank konvensional.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Zainal. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabeta, 2006.
- Arifin, Zainal. *Teori Keuangan dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Ekonista, 2007.
- Ascarya, Diana and Yumanita. *Analisis Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia dengan Data Envelopment Analysis*. TAZKIA Islamic Finance and Business Review, Vol. I., No. 2, 2006.
- Bank Indonesia. *Perkembangan Perbankan Syariah 2007* NAD.
- Bank Indonesia. *Data Bank Secara Keseluruhan di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, Lhokseumawe*. Lhokseumawe: 2011.
- Bacruddin. *Manajemen Pendanaan Bank Syariah*. Bahan Kuliah tidak dipublikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Enri, "Evaluasi Efisiensi Teknik Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Two-Stage Data Envelopment Analysis." dalam *Bahan-Bahan Terpilih dan Hasil Riset Terbaik Forum Riset Perbankan Syariah III*. Meda: 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Heralina, Aida. *Perbandingan Efisiensi Bank Syariah dan Bank Konvensional Di Indonesia*. Journal EKBIS, Vol. 3 No. 1 Januari-Maret, Jakarta, 2007.
- Huda, Nurul, Nasution, Mustafa Edwin. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Kuncoro, Mujrat. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi; Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Lewis, Mervyn K. dan Algoud, Latifa M. *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*. Cct. I, Jakarta: Serambi, 2007.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Cet, 2, Yogyakarta: Ekonista: 2005.

Nopirin. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*. Yogyakarta: BPFE, 1997.

Permono, S. Iswardono dan Darmawan, *Analisis Efisiensi Industri Perbankan di Indonesia (studi kasus bank-bank devisa di Indonesia Tahun 1991-1996)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Yogyakarta: UGM, 2000.

Rivai, Veithzal dkk. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007.

Suseno, Priyonggo. *Analisis Efisiensi dan Skal Ekonomi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia*. dalam Journal Of Islamic Business and Economics, Vol. 2 No. 1 Juni 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.